



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM
SUB UNIT KERJA : BIDANG DELIMITASI ZONA MARITIM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AYODHIA G.L KALAKE
2. Jabatan : ASISTEN DEPUTI DELIMITASI ZONA MARITIM
3. NHK : 699408

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.625.000.000**

1. Tanah Seluas 487 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, WARISAN Rp. 16.500.000
2. Tanah Seluas 876 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, WARISAN Rp. 16.000.000
3. Tanah Seluas 1241 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, WARISAN Rp. 17.500.000
4. Tanah Seluas 829 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, WARISAN Rp. 15.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/170 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 21.37 m2/18.22 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/311 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 2.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 185.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 505.540.381****F. HARTA LAINNYA** **Rp. 15.000.000**



Sub Total	Rp.	4.330.540.381
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.330.540.381

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.